

## **Dewan Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran**

*Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025*

**Samarinda** – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Melalui revisi besar ini, alokasi belanja daerah naik signifikan, sementara target pendapatan justru diturunkan.

Data menunjukkan, belanja daerah yang semula Rp20,95 triliun naik menjadi Rp21,69 triliun, atau bertambah Rp746,85 miliar (3,56 persen). Sebaliknya, target pendapatan daerah dipangkas dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, berkurang sekitar Rp950,76 miliar.

Kebijakan menaikkan belanja tersebut terutama dimaksudkan untuk menampung kebutuhan mendesak dan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat. Fokus diarahkan pada belanja wajib dan mengikat, seperti belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan dan kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan penyediaan air minum.

Di sisi lain, pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar dalam pos pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah naik drastis, dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun, atau meningkat 153,02 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp50 miliar.

Strategi ini ditempuh untuk menutup defisit sekaligus memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan. Meski demikian, DPRD Kaltim menegaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat.

Beberapa fraksi sebelumnya menyoroti besarnya porsi belanja pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk program strategis. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang fiskal bagi program prioritas pembangunan.

Ekti menegaskan bahwa proses pembahasan APBD-P telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Pembahasan dilakukan bersama TAPD, termasuk Bappeda Kaltim.

“Pada 12 September sudah disepakati Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan 26 September kemarin kita paripurnakan pengesahannya”, jelas Ekti, Selasa (30/9) kemarin.

DPRD Kaltim kata dia, akan terus mengawal visi-misi Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, khususnya terkait program Gratispol dan Jospol. Program ini kata Ekti, sudah lama ditunggu masyarakat, terutama mahasiswa di Kaltim.

“Setelah pengesahan, harapan kami segera disosialisasikan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, Red) agar bisa dieksekusi secepatnya,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD-P 2025, Ekti menegaskan bahwa publik menaruh harapan besar agar tambahan anggaran benar benar dialokasikan secara tepat sasaran. **(ai/ht/ip)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Dewan Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.